

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sarira Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan sebagai program percepatan pendaftaran tanah oleh Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018. Meskipun dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Sarira masih mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Petugas Satgas Fisik dan Petugas Satgas Yuridis dalam tahap pengumpulan data fisik dan data yuridis, akan tetapi kendala tersebut tidak menjadi penghalang untuk terlaksananya kegiatan PTSL, sehingga kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahap ke dua di Kelurahan Sarira ini tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien waktu serta sesuai dengan target perencanaan.

B. Saran

Bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kelurahan, disarankan agar bisa saling aktif dalam melakukan koordinasi, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat bisa maksimal. Bagi masyarakat, disarankan untuk turut aktif dalam mencari tahu informasi kepada pemerintah setempat, seperti informasi mengenai berkas persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengikuti kegiatan PTSL dan apa saja yang harus dilakukan masyarakat apabila sudah memenuhi persyaratan berkas, sehingga setiap

tahap pelaksanaan PTSL bisa berjalan dengan efisien, serta diharapkan mampu memberikan kerja sama yang baik khususnya dalam tahap pengumpulan data fisik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aartje Tehupeiory, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Raih Asas Sukses, Depok.
- Eddy Ruhiat, 1999, *Politik Hukum Pertanahan Nasional sampai Orde Baru*, Edisi ke-2, Alumni, Bandung.
- Garaika dan Darmanah, 2019, *Metodologi Penelitian*, Hira Tech, Lampung.
- Hartiwiningsih, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.
- Rachmat Trijono, dkk, 2015, *Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Rahman Abd dan Baso Madiung, 2017, *Politik Hukum Pertanahan (Suatu Kajian Historis dan Yuridis)*, Celebes Media Perkasa.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumarja FX., 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Lampung.
- Umar Ma'ruf, 2010, *Politik Hukum Pertanahan*, Cetakan Pertama, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-6, Kencana.
- , 2015, *Perolehan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- , 2017, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- , 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan ke-6, Kencana, Jakarta
- Waskito Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah

Internet/Website

Ridho Afriandedy, Problematika Hak Milik atas Tanah, <https://www.pacilegon.go.id/artikel/253-problematika-hak-milik-atas-tanah> diakses 17 November 2022.

JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/56273/pp-no-24-tahun-1997>, diakses 16 November 2022.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, diakses 17 November 2022

<https://kab-tanatoraja.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/651/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-pts1-tahun-anggaran-2022>, diakses 17 November 2022

<http://repository.uin-suska.ac.id/6391/3/BAB%20II.pdf>, diakses 17 November 2022.

Hasan, Legal Smart Channel,

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=6306#:~:text=Perjanjian%20tukar%20menukar%20hak%20atas,hak%20atas%20tanah%20yang%20ditukar>, diakses tanggal 21 November 2022.

http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5993/2/502015238_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf, diakses tanggal 21 November 2022.

<https://stihpada.ac.id/system/App/Post/files/000/000/060/original/D061507.pdf>, diakses tanggal 21 November 2022.